

JURNAL KOMUNIKASI

Volume 14, Nomor 1, Oktober 2019
P-ISSN 1907-848X, E-ISSN:2548-7647
Halaman 1 - 104

DAFTAR ISI

Editorial

**Ambiguitas, Inkonsistensi, dan Pengabaian Kepentingan Lokal
dalam Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia**

Rahayu
(1-22)

**Upaya Pemerintah Mempertahankan Posisi
sebagai Regulator Utama Penyiaran di Indonesia**

Nina Mutmainnah
(23-40)

**Kontestasi dan Negosiasi Kepentingan dalam Implementasi Sistem
Siaran Jaringan Televisi di Indonesia**

Ade Armando
(41-60)

**Model komunikasi Ideal antara Tuna Netra dan
Visual Reader dalam Menonton Film**

Cut Meutia Karolina, Eni Maryani & Dian Wardiana Sjucho
(61-74)

**Siasat *Kompasiana* dan *Indonesiana* dalam Memanfaatkan Raksasa
Media Sosial Demi *Traffic***

Aryo Subarkah Eddyono
(75-92)

**Framing News on Religion and Living Environment
in Online Media**

Vanesa Bella Sadmego & Muchammad Nasucha
(93-104)

EDITORIAL

Ekonomi Politik Media, Demokrasi, dan Program Pemberdayaan

Puji Rianto

Suatu kenyataan yang sulit dibantah saat ini bahwa kehadiran media dalam masyarakat modern telah menjadi bagian esensial dalam kehidupan masyarakat. Ia mempengaruhi sedemikian rupa kehidupan manusia modern dalam beragam cara, terutama dalam caranya mempengaruhi pembentukan budaya, pengorganisasian politik, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, media menjadi penggerak utama dalam perubahan-perubahan politik, mempengaruhi cara-cara warga negara mengorganisasikan diri, mengerjakan bisnis, dan berinteraksi secara sosial. Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan jika keberadaan media beserta operasionalisasinya menjadi “medan pertarungan” banyak pihak, terutama negara, kapital, dan masyarakat sipil (lihat Mosco, 2008; Collins, 2004; Wahyuni, 2006).

Negara berkepentingan untuk mengendalikan media karena hasrat politik demi mengendalikan “wacana publik” untuk melanggengkan kekuasaan. Ini telah dibuktikan selama Orde Baru dan terutama penyiaran selama pasca-reformasi (lihat Sudiby, 2009; Sudiby dan Patria, 2013;). Pemerintah terus-menerus berusaha meraih kendali sebagai regulator penyiaran. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah bukan saja tidak mau melepas posisinya sebagai regulator penyiaran, tapi bahkan ada hasrat kuat untuk mengembalikan lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI menjadi bagian pemerintah. Pendeknya, pemerintah ingin mengembalikan statusnya sebagai regulator dan sekaligus pengendali penyiaran publik sebagaimana telah dinikmati selama tiga dekade rezim Orde Baru berkuasa. Sementara itu, KPI yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali tidak progresif karena kuatnya kepentingan oligarki di parlemen di mana partai politik mempunyai jalinan erat dengan para pemilik televisi. Dalam institusi di mana kepentingan oligarkhi sangat kuat, kehadiran komisioner KPI yang kuat dan progresif sangat sulit diharapkan lahir dari situ. Kondisi ini bahkan menghambat perubahan undang-undang penyiaran yang lebih demokratis (lihat Rahayu, 2018).

Kapital terus berusaha mengontrol industri penyiaran karena frekuensi sebagai *public domain* adalah sumber daya langka. Penguasaan frekuensi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas kekuasaan politik, tapi juga ekonomi. Sebagai ilustrasi, menurut laporan Danang Sugianto (2019), total belanja iklan televisi pada kuartal pertama 2019 adalah 30,9 triliun yang meningkat 8% dibandingkan dengan periode yang sama 2018. Ini menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi yang masuk ke industri televisi sangat besar. Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan jika para pemilik tv terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kontrol atas penyiaran.

Kajian ekonomi politik yang dominan dalam Jurnal Komunikasi edisi kali ini pada dasarnya merefleksikan kegelisahan para penstudi ekonomi politik di Indonesia, yang sebenarnya juga menjadi kecenderungan global. Seperti ditunjukkan oleh Mosco (2008) dalam usahanya mendokumentasikan kecenderungan penelitian ekonomi politik, usaha-

usaha untuk melawan demokratisasi yang diperjuangkan masyarakat sipil dilakukan dengan kepemilikan silang industri media. Di Indonesia, kepemilikan silang (*cross-ownership*) telah menjadi hambatan serius bagi demokratisasi penyiaran pasca-reformasi. Bahkan, kegagalan implementasi sistem siaran berjaringan telah mematikan industri penyiaran lokal. Televisi daerah mengalami kesulitan untuk mendapatkan iklan nasional karena kalah bersaing, terutama dari sisi jangkauan (lihat Rianto dkk, 2012).

Bagaimanapun pasar media penyiaran di Indonesia tidak berlangsung secara adil. Pemilik tv Jakarta yang siaran nasional mempunyai keunggulan kompetitif karena jangkauan yang mereka miliki. Ini membuat mereka lebih efisien. Di sisi lain, kepemilikan silang dalam industri media televisi yang hanya dimiliki oleh beberapa kelompok usaha telah menciptakan keunggulan-keunggulan dalam pemasaran sehingga menjadi sangat kuat secara bisnis. Akibatnya, televisi daerah tidak mungkin memenangkan persaingan.

Ada dua dimensi utama dalam studi ekonomi politik sebagaimana sering dikerjakan oleh para sarjana (McChesney, 2004). *Pertama*, studi diarahkan untuk menjelaskan hubungan alamiah antara media dengan sistem komunikasi pada satu sisi, dan struktur sosial yang lebih besar pada sisi yang lain. Studi-studi ini berusaha menjelaskan bagaimana media dan sistem media serta isi memperkuat, menantang, atau mempengaruhi kelas-kelas sosial dan hubungan-hubungan sosial. Secara partikular, studi ekonomi politik dalam aras ini berusaha menggali bagaimana faktor-faktor ekonomi mempengaruhi hubungan-hubungan politik dan ekonomi. *Kedua*, studi ekonomi politik diarahkan untuk melihat secara khusus bagaimana kepemilikan dan mekanisme pendukung (seperti iklan) dan kebijakan-kebijakan pemerintah menciptakan sistem media dan teknologi komunikasi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku isi dan content media. Penelitian dalam aras ini menekankan faktor-faktor struktural dan proses tenaga kerja dalam produksi, distribusi, dan konsumsi komunikasi. Seperti ditunjukkan oleh McChesney, meskipun ekonomi politik tidak dapat menyediakan penjelasan yang komprehensif semua aktivitas komunikasi, tapi dalam beberapa hal mampu memberikan penjelasan yang sangat baik. Di sisi lain, ekonomi politik dapat menjelaskan suatu konteks dari beberapa pertanyaan penelitian komunikasi.

Tiga tulisan yang dimuat dalam Jurnal Komunikasi Edisi Oktober 2019 memang mengkaji penyiaran. Artikel Ade Armando mengkaji kegagalan implementasi siaran berjaringan di Indonesia, sedangkan artikel Nina Mutmainnah dan Rahayu membahas kebijakan penyiaran dengan titik fokus berbeda. Artikel Nina Mutmainnah fokus pada usaha pemerintah dalam mempertahankan posisinya sebagai regulator penyiaran. Analisis terhadap naskah-naskah perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 memberikan penjelasan bagaimana pemerintah terus berusaha untuk menjadi regulator penyiaran, yang di saat bersamaan memarginalkan peran KPI. Berdasarkan UU No. 32, regulator penyiaran adalah KPI dan Pemerintah. Dalam konteks penyiaran, meskipun ada kemajuan signifikan, tapi reformasi belum dapat dituntaskan dalam undang-undang ini karena pemerintah masih menjadi regulator utama yang secara prinsipil berlawanan dengan prinsip pengaturan penyiaran di negara demokrasi. Kedudukan ini tampaknya akan terus dikokohkan dalam undang-undang penyiaran yang baru.

Artikel Rahayu, di sisi lain, fokus pada kebijakan penyiaran terhadap penyiaran daerah. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penyiaran bukan saja tidak konsisten, tapi juga menegasikan kepentingan lokal. Ini dapat dari dominasi televisi

Jakarta dalam menggunakan frekuensi lokal, dan juga kewenangan KPID di daerah yang sangat terbatas. Akibatnya, regulasi penyiaran sangat tidak akomodatif terhadap kepentingan lokal. Padahal, dalam perspektif yang lebih luas, keberadaan media di tingkat lokal termasuk penyiaran sangat penting dalam menopang demokrasi daerah (Lihat Yusuf 2011). Absennya media lokal yang kuat membuat politik pada akhirnya harus kembali ke Jakarta ketika kandidat dalam pilihan umum di tingkat daerah harus berkampanye di media tv nasional.

Artikel Ade Armando menyoroti kegagalan implementasi penyiaran berjaringan di Indonesia. Sistem siaran berjaringan ini sebenarnya merupakan langkah maju, dan sekaligus kemenangan kelompok sipil dalam memperjuangkan kepentingannya dalam UU No. 32. Namun sayangnya, hingga 17 tahun sejak UU tersebut disahkan, sistem berjaringan tidak pernah terwujud. Menurut Armando, kebijakan adalah kontestasi beragam kepentingan. Namun, dalam konteks implementasi siaran berjaringan, baik DPR dan terutama pemerintah tidak berada di pihak masyarakat sipil. Sebaliknya, mereka berada di pihak swasta dengan memfasilitasi kepentingan-kepentingan mereka.

Kajian ekonomi politik masih dilanjutkan oleh Aryo Subarkah Eddyono. Namun, objek material studinya adalah media baru. Seperti ditunjukkan Sudibyo (2019), kapitalisasi telah menyentuh dunia media baru, dan raksasa media baru ini telah menjadi kekuatan yang luar biasa. Mereka bukan hanya kuat secara ekonomi dan politik, tapi juga secara sosial. Maka, media sosial *Facebook* ataupun *Twitter* telah mempunyai pengaruh yang luar biasa, dan sekaligus memberikan keuntungan-keuntungan ekonomi pada pemiliknya. Pertanyaannya: bagaimana perusahaan media nasional dalam suatu negara ketika berhadapan dengan raksasa media baru seperti *Facebook*? Eddyono berusaha menjawab pertanyaan ini dengan mengambil kasus *Kompasiana* dan Indonesia. Eddyono menyimpulkan bahwa *Kompasiana* dan *Indonesiana* tidak serta merta menjadi korban raksasa media sosial (tidak pula pasif dalam menghadapi raksasa media sosial), tapi mengambil jalan tengah atas upaya dominasi raksasa media sosial dalam arena informasi di dunia siber. Inilah yang disebut Eddyono sebagai “siasat” yang harus dilakukan demi mempertahankan eksistensinya di tengah kapitalisasi media digital.

Artikel keempat dan keenam tidak secara langsung menggunakan perspektif ekonomi politik. Namun, studi keduanya tidak dapat dilepaskan dari ekonomi politik. Studi Karolina, Maryani, dan Sjuchro mengkaji model ideal bioskop bagi pemberdayaan tuna netra. Menonton film di bioskop adalah rezim audio visual sehingga tuna netra akan menghadapi kendala. Parahnya, kapitalisasi film telah membuat kelompok termarginalkan. Oleh karena itu, usaha untuk membantu kaum tuna netra dalam usahanya menikmati film sangat berarti. Namun, beberapa kendala dihadapi terutama komunikasi antara *visual reader* dengan khalayak tuna netra yang dilayani.

Artikel keenam studi ini melakukan analisis tektual, dan menjadi satu-satunya kajian dengan objek material teks media. Dengan menggunakan analisis framing, kajian ini hendak melihat bagaimana isu lingkungan dan tokoh agama saling terkait. Studi Sadmego dan Nasucha menyimpulkan bahwa isu pelestarian lingkungan telah ditempatkan sebagai masalah penting bagi publik, dan bahwa tokoh agama mempunyai peran penting untuk bertindak sebagai *opinion leaders*. Di sini, dapat dikatakan bahwa media bagaimanapun mempunyai kekuasaan untuk mendefinisikan masalah, dan kajian ini membuktikan hal itu terutama dalam konteks isu lingkungan dan tokoh agama.

Daftar Pustaka

- Collins, Richard (2004). "The Fight for Proportionality in Broadcasting". In Andrew Calabrese and Collin Sparks (eds.). *Toward a Political Economy of Culture: Capitalism, Communication in the Twenty-First Century*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- McChesney, Robert (2004). "Making a Molehill out of a Mountain". In Andrew Calabrese and Collin Sparks (eds.). *Toward a Political Economy of Culture: Capitalism, Communication in the Twenty-First Century*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Mosco, Vincent (2008). "Current Trends in the Political Economy of Communication", *Global Media Journal -- Canadian Edition*, Volume 1, Issue 1, pp. 45-63
- Rahayu. (2018). *Politik Implementasi Kebijakan Penyiaran Televisi di Indonesia Pasca-Reformasi (Tahun 2002-2017): Dominasi dan Intervensi Kapital*, Program Studi Doktorat Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Rianto, Puji; Iwan Awaluddin Yusuf, Moch. Faried Cahyono, dkk. (2012). *Dominasi TV Swasta (Jakarta), Tergerusnya Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.
- Sudiby, Agus (2019). *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan*. Jakarta: KPG
- Sudiby, Agus. (2009). *Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media*. Jakarta: Kompas
- Sudiby, Agus dan Nezar Patria, (2013). "Ditempa Pertarungan Modal: Industri Pertelevisian di Indonesia Pasca-Orde Baru." *Prisma*, Vol 22. No.1, 2013
- Sugiono, Danang (2019). "Iklan di TV Masih Berlimpah, Mengapa NET TV Goyah?" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4671641/iklan-di-tv-masih-berlimpah-mengapa-net-tv-goyah>
- Wahyuni, Herman Indah. (2006). "Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran Indonesia: Aspirasi, Pilihan, dan Realitas". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 10, Nomor 2 (November 2006), hal. 149-170
- Yusuf, Iwan Awaluddin (2011). "Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 3, Maret 2011 (297-316)

